



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTADI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 154693

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **910.000.000**

1. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **142.940.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



4. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
24.940.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 166.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 558.219.299

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.777.159.299

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.777.159.299

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.